



BALAI POM DI MANOKWARI

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI MANOKWARI

TAHUN ANGGARAN
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga Balai POM di Manokwari senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Balai POM di Manokwari tahun 2021 triwukan III.

Laporan Kinerja tahun 2021 triwukan III merupakan media pertanggungjawaban Balai POM di Manokwari yang berisi informasi tentang pencapaian sasaran, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi permasalahan sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2021 triwukan III, Balai POM di Manokwari selaku Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan produksi, melakukan pengujian sampel obat dan makanan, serta memberikan pelayanan melalui informasi dan komunikasi dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat. Balai POM di Manokwari pada tahun 2021 triwukan III memperoleh capaian kinerja dengan kategori tidak dapat disimpulkan (142.51%) Dari 11 (sebelas) sasaran kegiatan, 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan kategori nilai “baik”, 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kategori nilai “kurang”, 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan kategori capaian “tidak dapat disimpulkan”, dan 4 (empat) sasaran kegiatan merupakan target dan penilaian akhir tahun.

Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja tahun 2021 triwukan III, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan serta memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja yang jauh lebih baik bagi Balai POM di Manokwari.

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Manokwari dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Papua Barat.

Manokwari, Oktober 2021

Kepala Balai POM di Manokwari



Heri Baan, S.Si., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS BALAI DI MANOKWARI DAN LOKA DI SORONG	3
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	7
E. ISU STRATEGIS	10
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. VISI	15
B. MISI	16
C. BUDAYA ORGANISASI.....	22
D. TUJUAN	23
E. SASARAN KEGIATAN.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA	35
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA	45
C. REALISASI ANGGARAN	84
BAB IV PENUTUP	85
LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM dan perencanaan penugasan usulan Balai berdasarkan kondisi lingkungan strategis Balai POM di Manokwari serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Manokwari kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Papua Barat. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan

obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2).

Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris Utama;
- c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f) Deputi Bidang Penindakan;
- g) Inspektorat Utama;
- h) Pusat; dan
- i) Unit Pelaksana Teknis

Dalam melaksanakan tugasnya di Provinsi Papua Barat, Badan POM memiliki 2 UPT yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong.

Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- c) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
- e) Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.

- f) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
- g) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- h) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- i) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- k) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI MANOKWARI DAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program.

Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua Barat meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Guna mendukung pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat, laboratorium Balai POM di Manokwari telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium pengujian modern seperti Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS), Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Gas Chromatography (GC), Spektrofotometer, Thin Layer Chromatography (TLC), Alat Disolusi, Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) dan peralatan laboratorium lainnya. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Sorong menggunakan test kit untuk pengujian makanan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong selalu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat, perluasan dan kemudahan akses terhadap produk obat dan makanan bagi masyarakat, serta kepentingan strategis lainnya yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Manokwari merupakan UPT dari Badan POM yang berkedudukan di Papua Barat. UPT Badan POM berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

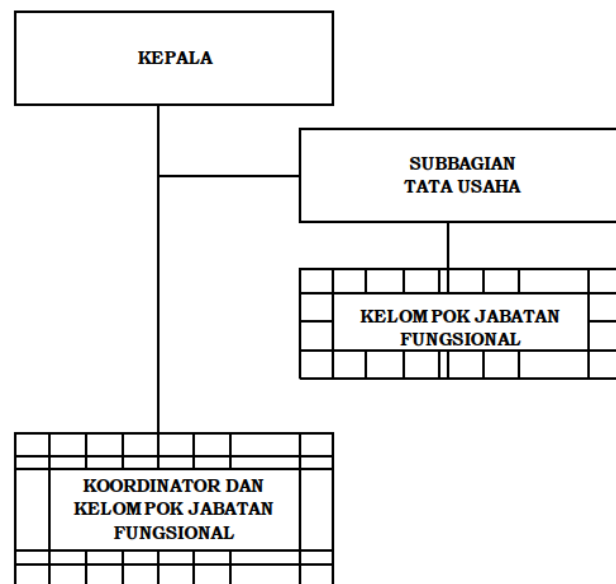
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sedangkan untuk susunan organisasi balai POM di Manokwari terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Balai POM di Manokwari sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar: Bagan Organisasi Balai POM di Manokwari

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Selain Balai POM di Manokwari, terdapat UPT Badan POM di Papua Barat, yakni Loka POM di Kabupaten Sorong. Susunan organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong terdiri dari:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar: Bagan Organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai POM di Manokwari memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibagi di dalam UPT Balai dan Loka.

1) Pegawai Balai POM di Manokwari

Balai POM di Manokwari memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 41 pegawai PNS. Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, direkrut pramubakti sebanyak 11 orang, 6 Satpam, cleaning service 4 dan 1 Supir.

2) Pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong

Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 13 pegawai PNS. Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, direkrut pramubakti sebanyak 2 orang, 2 Satpam dan 1 Supir.

b. Sumber Daya lainnya

Kantor Balai POM di Manokwari memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 9.142 m² dan luas bangunan 1752 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisa terkini. Balai POM di Manokwari memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai POM di Manokwari dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya. Sedangkan untuk kantor Loka POM di Kabupaten Sorong terdiri dari tanah hibah dengan luas 20.000 m².

c. Anggaran

Anggaran Balai POM di Manokwari termasuk Loka POM di Kabupaten Sorong bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. DIPA-063.01.2.689071/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 sebesar Rp 28.069.064.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Namun sampai dengan triwulan III tahun 2021 anggaran Balai POM di Manokwari mengalami penurunan akibat adanya pemotongan anggaran, dimana anggaran pada triwulan III sebesar Rp.24.079.803.000.

2. EKSTERNAL

Wilayah kerja Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong adalah seluruh provinsi Papua Barat, mempunyai luas wilayah seluruhnya 102.955,15 km² atau sekitar 13,102% dari luas Pulau Papua.



Gambar: Peta Provinsi Papua Barat

Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari mencakup 8 Kabupaten sebagai berikut:

- a. Kabupaten Manokwari
- b. Kabupaten Raja Ampat
- c. Kabupaten Teluk Bintuni
- d. Kabupaten Teluk Wondama
- e. Kabupaten Fak-Fak
- f. Kabupaten Kaimana
- g. Kabupaten Pegunungan Arfak
- h. Kabupaten Manokwari Selatan

Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong mencakup 4 kabupaten dan 1 wilayah kota sebagai berikut:

- a. Kabupaten Sorong
- b. Kabupaten Sorong Selatan
- c. Kabupaten Tambrau
- d. Kabupaten Maybrat
- e. Kota Sorong

E. ISU STRATEGIS

Beberapa Isu Strategis yang terjadi selama tahun 2021 triwulan I, antara lain:

1. Pandemi Virus Covid-19

Adanya pandemi virus Covid-19 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja Balai POM di Manokwari, antara lain disebabkan :

- a) Pembatalan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19, maka pemerintah pusat mengambil kebijakan sosial distancing yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang.

- b) Pemberlakuan sistem kerja Work From Home (WFH)

Berdasarkan SE dari Kepala Badan POM RI No. KP.11.01.2.24.03.20.21 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dimana penyelenggaraan kegiatan selama Pandemi Covid-19 dibatasi antara lain :

- ✓ Beberapa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang menggerakkan massa dan bertatap muka ditunda dan dialihkan ke KIE online.
- ✓ Beberapa kegiatan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan serta penindakan dilakukan secara desktop inspection atau desk audit dan diprioritaskan melalui media online seperti skype, whatsapp, dll.

2. Pengawasan Obat dan Makanan

- a) Masih minimnya produk pangan hasil industri rumah tangga yang memiliki izin edar PIRT.

Dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat, hanya 4 (empat) Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan izin PIRT. Di sisi lain, terdapat produk pangan industri rumah tangga yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain: tepung sagu, abon ikan, kerupuk ikan, produk asinan dalam kemasan, selai buah, sirup pala, bakso, sari buah pala ready to drink, teh dalam kemasan ready to drink, minyak lintah, ekstrak buah merah, minyak daun tiga jari, dsb. Oleh karena itu,

masih diperlukan pembinaan kepada UMKM dan koordinasi yang intens dengan lintas sektor yang terkait.

- b) Terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi di Papua Barat.

Papua Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah. 2 (dua) di antara sekian banyak kekayaan alam tersebut adalah akar lawang dan minyak buah merah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan produk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Namun, terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi menjadi kendala pemenuhan persyaratan berkembangnya UKOT dan UMOT.

- c) Terbatasnya *supplier* reagen, media, gas, serta jasa pengiriman/ekspedisi di Papua Barat.

Ketersediaan kebutuhan mendasar laboratorium pengujian Balai POM di Manokwari sejauh ini belum tersedia secara lengkap di Papua Barat. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, barang harus didatangkan dari luar wilayah Papua Barat. Proses pengiriman barang dari luar Papua Barat memerlukan biaya yang tinggi dan waktu yang cukup lama. Selain itu, barang-barang yang dipesan sebagian besar datang tidak tepat waktu dan sebagian tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diatur dalam kontrak/pesanan. Hal-hal tersebut mempengaruhi kinerja pengujian di laboratorium Balai POM di Manokwari.

- d) Pengujian Laboratorium dalam mendukung UMKM

Upaya Balai POM di Manokwari dalam mendukung produk UMKM di Provinsi Papua Barat dengan membantu melakukan pengujian sampel produk yang didaftarkan. Pengujian dilakukan sesuai dengan parameter untuk pendaftaran produk tersebut. Sampel produk UMKM juga dimasukkan dalam sampling rutin agar membantu UMKM.

- e) Pengujian Laboratorium untuk Kejadian Luar Biasa

Dalam mendukung layanan publik Balai POM di Manokwari. Seksi Pengujian dan Seksi Informasi Komunikasi Balai POM Manokwari

siap saat terjadi kejadian luar biasa di hari libur. Pada tahun 2019 terdapat Kejadian Luar Biasa produk pangan dan segera ditindaklanjuti dengan dilakukan pengujian kimia saat itu juga dan terbit hasilnya. Pengujian mikrobiologi yang langsung dilakukan hari itu juga dan hasilnya juga langsung ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

- f) Masih rendahnya tindak lanjut Pemerintah Daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak semua tindak lanjut hasil pemeriksaan obat dan makanan berada dalam kewenangan Badan POM sehingga sebagian tindak lanjut hanya dalam bentuk rekomendasi dan hingga saat ini hanya sebagian kecil rekomendasi Balai POM di Manokwari yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut menyebabkan masih ditemukannya pelanggaran yang berulang pada saat pemeriksaan.

- g) Diskontinu program yang diinisiasi oleh Badan POM.

Sejak tahun 2014 – 2019 total 18 desa telah diintervensi Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan setelah intervensi diharapkan desa-desa tersebut melanjutkan program GKPD dengan menggunakan anggaran desa. Namun hingga saat ini, belum terdapat desa yang melanjutkan program tersebut secara mandiri. Demikian juga program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dimana diharapkan pemerintah daerah melalui dinas Pendidikan dapat memfasilitasi terciptanya kantin sehat. Namun hingga saat ini, hanya sebagian kecil sekolah yang sudah memiliki kantin sehat.

3. Perdagangan Obat dan Makanan Secara Online

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia, sebelumnya dilakukan secara konvensional, sekarang dapat dilakukan secara *online*. Pengawasan rutin Balai POM di Manokwari menunjukkan penjualan obat dan makanan secara *online* di Papua Barat meningkat pesat dan sebagian produk yang dijual adalah produk-produk tanpa izin edar.

a) Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Balai POM di Manokwari dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

1. Kemitraan dengan UMKM

Balai POM di Manokwari melakukan pembinaan UMKM dalam rangka membantu registrasi terutama untuk UMKM yang memerlukan bantuan teknis pengujian laboratorium. Balai POM di Manokwari memiliki program inovasi layanan yang mendukung UMKM yaitu “PACE PAPEDA (Pelayanan Cepat Pendampingan Pelaku Usaha Daerah)”.

2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Semangat Generasi Milenial

Generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digitalisasi melalui media sosial. Sementara itu, tidak semua informasi yang disajikan melalui media sosial dapat dipercaya 100% kebenarannya. Melihat perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih ini, Balai POM di Manokwari mengambil inisiatif untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada generasi milenial yang ada di Papua Barat. Inisiatif ini dilakukan untuk mengantisipasi berkembang luasnya *hoax* seputar obat dan makanan dalam masyarakat di Papua Barat.

b) Reformasi Birokrasi untuk Mencapai *Good Governance*

Balai POM di Manokwari berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi pada 6 (enam) area perubahan. Telah dilakukan konsultasi ke Instansi Eksternal yang telah berpredikat WBK pada awal tahun, sebagai upaya untuk mendapatkan masukan terhadap penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas yang akan direview kembali oleh tim PMPRB di Inspektorat II.

c) Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup pada setiap sarana pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Balai POM di Manokwari melakukan fungsi strategis dengan :

1. Peningkatan *sampling* terhadap obat program JKN serta pengujian di laboratorium dalam rangka memantau mutu obat yang diproduksi.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian.
3. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja. Melalui upaya tersebut, diharapkan obat-obatan JKN di Provinsi Papua Barat aman untuk dikonsumsi.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai POM di Manokwari tahun 2021 triwulan III dapat diikhtisarkan berikut ini.

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi Balai POM di Manokwari
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan perencanaan dan Perjanjian Kinerja Balai POM di Manokwari Triwulan III Tahun 2021.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Balai POM di Manokwari Triwulan III Tahun 2021 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Balai POM di Manokwari Triwulan III Tahun 2021 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

A. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;

5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan
Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman.

Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

- a. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*.
- b. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- c. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- d. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan

dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara kesatuan guna Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan

menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

b. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

d. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen,

dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

C. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

D. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

E. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Manokwari. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase obat yang memenuhi syarat
		Persentase makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi,	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
	informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
SK 6	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SK 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Indeks RB Balai POM di Manokwari
		Nilai AKIP Balai POM di Manokwari
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM Manokwari yang optimal
SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di lingkup Balai POM di Manokwari

Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan Balai POM di Manokwari tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat Provinsi Papua Barat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Manokwari merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* berupa audit sertifikasi sarana sebelum produk diberikan izin edar. Sedangkan pengawasan *post-market* terdiri dari: *Pertama*, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Papua Barat, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan

Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten dan terstandar. *Kedua*, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. *Ketiga*, penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu. Untuk mengukur capaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut:

- ✓ Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 83.6% pada triwulan III tahun 2021.
- ✓ Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 80% pada triwulan III tahun 2021.
- ✓ Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 82% pada triwulan III tahun 2021.
- ✓ Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 86% pada triwulan III tahun 2021.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu terus dijalin kerjasama dengan semua pihak. Komunikasi,

Informasi dan Edukasi terus ditingkatkan. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Balai POM di Manokwari bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai POM di Manokwari berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan memberikan *insentif*, *clearing house*, dan pendampingan *regulatory*.

Kerjasama Balai POM di Manokwari dengan lintas sektor telah dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.

Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat masih berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus semakin cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Manokwari melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikatornya sebagai berikut:

- ✓ Indeks kesadaran masyarakat (*Awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu (target tahunan).

3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (target tahunan).
- b) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (target tahunan).

- c) Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari (target tahunan).

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Manokwari mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Manokwari, maka disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di sisi lain tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai visi misi Badan POM. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Manokwari mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Manokwari perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja yang digunakan adalah:

- a) Presentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 89% di triwulan III tahun 2021.
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 37.5% di triwulan III tahun 2021.
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 88% di triwulan III tahun 2021.
- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 55% di triwulan III tahun 2021.

- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 63% di triwulan III tahun 2021.
- f) Indeks layanan Publik Balai POM di Manokwari (target tahunan).

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Pengukuran dari efektivitas KIE dengan indikator sebagai berikut:

- a) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 85.10 di triwulan III tahun 2021.
- b) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 40 sekolah di tahun 2021. Target progress 55% di triwulan III tahun 2021.
- c) Jumlah desa pangan aman dengan target 8 desa di tahun 2021. Target progress 75% di triwulan III tahun 2021.
- d) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 4 pasar di tahun 2021. Target progress 60% di triwulan III tahun 2021.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Balai POM di Manokwari merupakan UPT yang melakukan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Papua Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang benar agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Indikator meningkatnya pengujian obat dan makanan antara lain:

- a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 62.25% di triwulan III tahun 2021.
- b) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 67.5% di triwulan III tahun 2021.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Balai POM di Manokwari selaku UPT di Provinsi Papua Barat harus bertanggungjawab

akan keamanan obat dan makanan di Papua Barat. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah UPT maka Balai POM di Manokwari dapat melakukan pembinaan/penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dari efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan adalah:

- ✓ Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 20% di triwulan III tahun 2021.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada

akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks RB Balai POM di Manokwari (target tahunan).
- b) Nilai AKIP Balai POM di Manokwari (target tahunan).

9. Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks Profesional ASN pada Balai POM di Manokwari (target tahunan).

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan

makanan. Indikator dari menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan antara lain:

- a) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar (target tahunan).
- b) Indeks pengelola data dan informasi Balai POM di Manokwari yang optimal dengan target nilai 2 di triwulan III tahun 2021.

11. Terkelolanya keuangan Balai POM di Manokwari secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting *dalam Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari dengan target nilai 50 di triwulan III tahun 2021.
- b) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari dengan target efisien (95%) di triwulan III tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja triwulan III merupakan pengukuran kinerja periode ketiga pada tahun 2021. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2021. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yakni:

Target sasaran kegiatan dan indikator kinerja tahun 2021 triwulan III

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW III
SK 1	Terwujudnya Obat dan	Persentase obat yang memenuhi syarat	83.60%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW III
	Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase makanan yang memenuhi syarat	80.00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarBAB kan hasil pengawasan	82.00%
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.00%
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW III
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37.50%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88.00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55.00%
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63.00%
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari	-
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	85.10
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55%
		Jumlah desa pangan aman	75%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60%
SK 6	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	62.25%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	67.5%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW III
	Balai POM di Manokwari		
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20%
SK 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Indeks RB Balai POM di Manokwari	-
		Nilai AKIP Balai POM di Manokwari	-
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di Balai POM di Manokwari	-
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawsan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM Manokwari yang optimal	2.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW III
SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari	50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari	95.00%

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2021 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Kriteria indikator

KRITERIA	% CAPAIAN
SANGAT BAIK	$110\% \leq x \leq 120\%$
BAIK	$90\% \leq x < 110\%$
CUKUP	$70\% \leq x < 90\%$
KURANG	$50\% \leq x < 70\%$
SANGAT KURANG	$x < 50\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 120\%$

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian yang telah diuraikan, secara ringkas capaian sasaran kegiatan Balai POM di Manokwari tahun 2021 triwulan II tersaji dalam tabel berikut:

Capaian Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN SASARAN	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	96.20	Baik
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan	-	-

	Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari		
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Manokwari	102.39	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	124.16	Tidak dapat disimpulkan
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	97.14	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari	393.75	Tidak dapat disimpulkan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	-	
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	-	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	63.75	Kurang
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	120.16	Tidak dapat disimpulkan
Rata-rata		142.51	Tidak dapat disimpulkan

Capaian kinerja Balai POM di Manokwari berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Kinerja Balai POM di Manokwari Berdasarkan Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	(T) TW III	(R) TW III	(C) TW III	Kriteria
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase obat yang memenuhi syarat	83.6	86.91	103.96%	Baik
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	76.4	95.50%	Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	81.03	98.82%	Baik
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	74.42	86.53%	Cukup
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	0	0	-	Tahunan
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	-	Tahunan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	(T) TW III	(R) TW III	(C) TW III	Kriteria
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	-	Tahunan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari	0	0	-	Tahunan
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	76.09	85.49%	Cukup
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37.5	38.22	101.92%	Baik
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	96.43	109.58%	Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	49.12	89.31%	Cukup
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	79.15	125.63%	Tidak dapat disimpulkan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	(T) TW III	(R) TW III	(C) TW III	Kriteria
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari	0	0	-	Tahunan
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	85.1	97.94	115.09%	Sangat Baik
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55	80	145.45%	Tidak dapat disimpulkan
		Jumlah desa pangan aman	75	74.99	99.99%	Baik
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60	81.66	136.10%	Tidak dapat disimpulkan
SK 6	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	62.25	57.17	91.84%	Baik
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	67.5	69.15	102.44%	Baik
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	78.75	393.75%	Tidak dapat disimpulkan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	(T) TW III	(R) TW III	(C) TW III	Kriteria
SK 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Indeks RB Balai POM di Manokwari	0	0	-	Tahunan
		Nilai AKIP Balai POM di Manokwari	0	0	-	Tahunan
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di Balai POM di Manokwari	0	0	-	Tahunan
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	-	Tahunan
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM Manokwari yang optimal	2	1.275	63.75%	Kurang
SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari	50	70.16	140.32%	Tidak dapat disimpulkan
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari	95	95	100.00%	Baik

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Balai POM di Manokwari telah memenuhi target indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 86.91% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Papua Barat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase obat yang memenuhi syarat	83.6%	86.91%	103.96%	Baik

Pada tahun 2021 triwulan II, capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari sebesar 103.96% dengan realisasi sebesar 86.91%. Nilai persentase ini diperoleh dari 359 sampel Obat yang diperiksa dan diuji terdapat 312 sampel Obat yang memenuhi syarat.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Rekomendasi perbaikan capaian TW II yakni Tetap dilakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah di tindaklanjuti di TW III dengan telah dilakukan sampling dan pengujian sampel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator “ persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari” dikarenakan telah dilakukan sampling

sesuai dengan pedoman sampling serta pengawasan telah dilakukan secara optimal, sehingga Obat dan Makanan yang beredar telah memenuhi syarat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain:

1. Tetap mengintensifkan pengawasan
2. Mengintensifkan koordinasi dengan lintas sektor
3. Melakukan patroli SIBER dan inteligen

Arahan pimpinan dalam rangka mempertahankan dan memperbiki kinerja adalah tetap ditingkatkan kinerja agar target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Balai POM Manokwari telah berhasil memenuhi target indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 76.4% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Papua Barat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase makanan yang memenuhi syarat	80%	76.4%	95.50%	Baik

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 triwulan III sebesar 95.50% dengan realisasi sebesar 76.4%. Nilai persentase ini diperoleh dari 89 sampel Makanan yang diperiksa dan diuji terdapat 68 sampel

Makanan yang memenuhi syarat. Capaian target pada triwulan III masuk dalam kategori “baik”.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan I

Rekomendasi perbaikan capaian TW II yakni tetap dilakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah di tindaklanjuti di TW III dengan telah dilakukan sampling dan pengujian sampel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator “ persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari” dikarenakan telah dilakukan telah dilakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling serta pengawasan telah dilakukan secara optimal, sehingga Obat dan Makanan yang beredar telah memenuhi syarat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain:

1. Tetap mengintensifkan pengawasan
2. Mengintensifkan koordinasi dengan lintas sektor
3. Melakukan patroli SIBER dan inteligen

Arahan pimpinan dalam rangka mempertahankan dan memperbiki kinerja adalah tetap ditingkatkan kinerja agar target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Balai POM Manokwari telah berhasil memenuhi target indikator kinerja “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 81.03% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82%	81.03%	98.82%	Baik

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 triwulan III sebesar 98.82% dengan realisasi sebesar 81.03%. Nilai persentase ini diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 116 dengan hasil 94 sampelnya memenuhi syarat. Hasil capaian indikator masuk dalam kategori baik.

Rekomendasi perbaikan capaian TW II yakni tetap dilakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah di tindaklanjuti di TW III dengan telah dilakukan sampling dan pengujian sampel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator “ persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dikarenakan telah dilakukan telah dilakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling serta pengawasan telah dilakukan secara optimal, sehingga Obat dan Makanan yang beredar telah memenuhi syarat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain:

1. Tetap mengintensifkan pengawasan
2. Mengintensifkan koordinasi dengan lintas sektor
3. Melakukan patroli SIBER dan inteligen

Arahan pimpinan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja adalah tetap ditingkatkan kinerja agar target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Balai POM Manokwari pada tahun 2021 triwulan III telah memenuhi target indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 74.42% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%	74.42%	86.53%	Cukup

Persentase capaian terhadap target pada indikator Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 triwulan III sebesar 86.53%. Nilai persentase ini diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sebanyak 86 sampel dengan hasil 64 sampelnya memenuhi syarat sehingga kategori capaian masuk dalam kriteria cukup.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Rekomendasi perbaikan capaian TW II yakni adanya pendampingan dari fungsi terkait sebaiknya juga mengusahakan perbaikan pada label sehingga tidak mempengaruhi penilaian secara keseluruhan dan telah di tindaklanjuti pada TW III dengan telah dilaporkan TL rekomendasi ke Ditwas Peredaran Pangan Olahan serta AMDK TMS sudah dilakukan TL dengan bersurat ke Ditwas Peredaran dan AMDK sudah diinterfensi dengan penghentian sementara kegiatan.

Analisis Keberhasilan/ kegagalan pencapaian indikator “ persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” yang masih dalam kategori cukup dikarenakan banyak sampel targeted berupa produk IRT-P yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan karena tidak mencantumkan kode produksi dan sudah dilakukan pembinaan terhadap produsen terkait.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain:

1. Tetap mengintensifkan pengawasan
2. Mengintensifkan koordinasi dengan linsek
3. Melakukan patroli SIBER dan inteligen

Arahan pimpinan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja adalah:

1. Intensifkan pengawasan terhadap produk industri rumah tangga
2. Koordinasi dengan DINKES agar dilakukan pendampingan
3. Melakukan BIMTEK kepada PIRT terkait dengan label dan kemasan yang sesuai dengan aturan yang ada.

2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu merupakan indikator yang dinilai dalam indeks tahunan sehingga tidak dilaporkan dalam laporan interm.

Dalam penilaian Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terdapat beberapa aspek yang dijadikan tolak ukur penilaian yakni:

- a) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- b) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar.

Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

- c) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Capaian Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	-

3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.

Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti *desk*, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.

Capaian Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.

Untuk mengukur indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu

- a) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada

masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).

- b) Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness) , memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai
POM di Manokwari**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-

4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Pada tahun 2021 triwulan III capaian “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” sebesar 76.09% dimana target tahun 2021 triwulan III sebesar 89%.

Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan	89%	76.09%	85.49%	Cukup

di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	distribusi yang dilaksanakan				
---	---------------------------------	--	--	--	--

Pada tahun 2021 triwulan III , dari 322 jumlah rekomendasi yang diterbitkan, sebanyak 245 rekomendasi telah ditindak lanjuti sehingga persentase tindak lanjut sebesar 76.09% dari target yang telah ditetapkan sebesar 89%. Persentase ketercapaian target sebesar pada tahun 2021 triwulan III sebesar 85.49%. Presentase capaian target pada indikator keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2021 triwulan III masuk dalam kategori “cukup”.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Rekomendasi perbaikan capaian TW II yakni Tetap dilakukan permintaan CAPA pada sarana yang telah diperiksa dan hal tersebut telah ditindaklanjuti pada TW III namun belum optimal.

Keberhasilan pencapaian indikator “ Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dikarenakan masi terdapat beberapa permintaan CAPA yang belum ditindaklanjuti.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain:

1. Intensifkan permintaan perbaikan melalui CAPA.
2. Lanjutkan pemeriksaan apabila belum melakukan perbaikan melalui CAPA.
3. Jika dalam pemeriksaan berulang masih dilakukan temuan yang sama, maka tindak lanjut dinaikkan.
4. Dilakukan pendampingan pembuatan perbaikan melalui CAPA melalui Sosialisasi CAPA.

Arahan pimpinan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja adalah:

1. Intensifkan permintaan perbaikan melalui CAPA.
2. Lanjutkan pemeriksaan apabila belum melakukan perbaikan melalui CAPA.
3. Jika dalam pemeriksaan berulang masih dilakukan temuan yang sama, maka tindak lanjut dinaikkan.
4. Dilakukan pendampingan pembuatan perbaikan melalui CAPA melalui Sosialisasi CAPA.

4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Pada tahun 2021 triwulan III, capaian kinerja pada indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” sebesar 38.22% dari target 37.5%.

Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37.5%	38.22%	101.92%	Baik

Pada tahun 2021 triwulan III, keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti dari 450 rekomendasi yang dikeluarkan sebanyak 193 ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Realisasi dari capaian indikator sebesar 38.22% dari target 37.5% sehingga nilai capainnya tahun 2021 triwulan III sebesar 101.92%. Capaian kinerja masuk dalam kategori “ baik”.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Rekomendasi perbaikan capaian TW II yakni meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait TL dan telah dilakukan tindak lanjut berupa koordinasi dengan stakeholder terkait TL di TW III.

Keberhasilan pencapaian indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dikarenakan telah dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tindaklanjut yang mampu mengoptimalkan capaian kinerja.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja serta arahan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan dan program adalah mengintensifkan koordinasi dengan stakeholder terkait TL untuk hasil yang lebih optimal.

4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ketiga yaitu “persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” Perhitungan dan realisasi Indikator Kinerja *output* tahun 2021 triwulan III adalah sebagai berikut ini:

Persentase Keputusan Penyelesaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	96.43%	109.58%	Baik

Pada tahun 2021 triwulan III Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian terhadap 112 permohonan sertifikasi dimana sebanyak 108 telah

diterbitkan tepat waktu. Persentase capaian Balai POM di Manokwari pada tahun 2021 triwulan III sebesar 109.58%. Hasil kinerja pada indikator berada pada kriteria capaian “baik”, walau masih dalam kategori baik namun sudah terdapat peningkatan nilai realisasi apabila dibandingkan dengan triwulan II.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Rekomendasi perbaikan capaian TW II yakni akan tetap melihat penilaian berdasarkan SOP dalam proses pemenuhan penilaian sertifikasi dan telah dilakukan tindak lanjut pada triwulan III dengan telah dilakukan penilaian berdasarkan SOP dalam proses pemenuhan penilaian sertifikasi.

Keberhasilan pencapaian indikator “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dikarenakan Pengujian sampel pihak ketiga semua dilakukan sesuai dengan SOP dan dikerjakan tepat waktu sehingga persentase tepat waktu penyelesaian sertifikat pengujian menjadi tinggi.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain tetap dilakukan pendampingan dan penilaian sarana sesuai dengan SOP secara intens. Kemudian arahan dari pimpinan terkait perbaikan kinerja adalah tetap dilakukan peningkatan kinerja agar target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Pada indikator “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan”, target indikator pada tahun 2021 triwulan III sebesar 55%. Pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Sarana Produksi OMKA yang MK di Balai POM Manokwari

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana produksi OMKA yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi OMKA yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	49.12%	89.31%	Cukup

Pada tahun 2021 triwulan III terdapat 57 sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 28 sarana, sehingga realisasi atas capaian kinerja sebesar 49.12%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 triwulan III, persentase capaian kinerja sebesar 89.31% dengan kategori capaian “cukup”.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Rekomendasi perbaikan capaian TW II yakni melakukan pembinaan pada sarana produksi obat dan makanan secara intensif dan telah dilakukan tindak lanjut pada triwulan III dengan dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat dan makanan secara intensif.

Keberhasilan yang masih belum maksimal pada indikator “persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dikarenakan masih terdapat beberapa sarana produksi yang secara ketentuan memang belum memenuhi ketentuan, namun akan dilakukan pembinaan secara intensif untuk meningkatkan persentase sarana MK di Papua Barat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain tetap dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat dan makanan secara intensif serta arahan dari pimpinan yakni tetap ditingkatkan kinerja agar target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator kelima yakni “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan”. Target indikator pada tahun 2021 triwulan III sebesar 63%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa dikali 100%.

Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	79.15%	125.63%	Tidak dapat disimpulkan

Pada tahun 2021 triwulan III terdapat 614 sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 486 sarana, sehingga realisasi atas capaian kinerja sebesar 79.15%. Capaian kinerja masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Rekomendasi perbaikan capaian TW II yakni intensifikasi pembinaan pada sarana produksi obat dan makanan dan tela dilakukan pada triwulan III sehingga mampu menghasilkan capaian yang maksimal.

Keberhasilan yang masih belum maksimal pada indikator “persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dikarenakan sarana distribusi sudah mendapatkan pembinaan dari BPOM di Manokwari sehingga pelaku usaha secara keseluruhan melakukan perbaikan yang berakibat pada penilaian sarana memenuhi ketentuan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain tetap dilakukan pembinaan terhadap sarana distribusi Obat dan Makanan secara intensif serta arahan dari pimpinan yakni tetap ditingkatkan kinerja agar target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

4.6 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- Profesionalitas SDM (18%);
- Sarana Prasarana (15%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- Inovasi (7%).

Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik BPOM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari	-	-	-	-

Indikator Kinerja keenam adalah “Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari”. Nilai indeks dikeluarkan oleh Tim Penilai UPP BPOM. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan pada akhir tahun, sehingga tidak ada realisasi pada triwulan III tahun 2021.

5.1 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja pertama adalah “Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan” dengan target sebesar 85.10 pada tahun 2021 triwulan III.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2021 triwulan III adalah sebagai berikut ini:

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	85.1	97.94	115.09%	Sangat Baik

dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari					
---	--	--	--	--	--

Capaian kinerja terkait indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing lingkup Balai POM di Manokwari berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP pada tahun 2021 dimana penilaian dilakukan per triwulan. Capaian indeks merupakan penggabungan antara capaian Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong. Capaian kinerja pada triwulan III tahun 2021 menunjukkan kategori “sangat baik”.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Pada triwulan II capaian kinerja menunjukkan kategori sangat baik dimana rekomendasi yang diberikan yakni tetap dilakukan penyesuaian penyampaian materi dengan audiens agar lebih mudah dimengerti untuk menjaga pencapaian target pada triwulan-triwulan berikutnya dan telah dilakukan penyesuaian bahan materi dengan audiens.

Keberhasilan pencapaian indikator “Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan” dikarenakan telah dilakukan cara penyampaian dan bahan materi menyesuaikan dengan audiens serta informasi terkini.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain akan dilakukan pencarian bahan materi KIE terupdate sesuai dengan informasi yang di butuhkan masyarakat saat ini serta arahan dari pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan yakni tetap ditingkatkan kinerja agar target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai

5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Indikator Kinerja selanjutnya adalah “Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman” dengan target sebanyak 40 sekolah pada tahun 2021. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut

menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Realisasi triwulanan III pada indikator ini dihitung berdasarkan progress tahapan, berikut capaian kinerja pada tahun 2021 triwulan III:

Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	55	80	145.45%	55

Tahapan kegiatan pada indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman antara lain adalah:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00
2	Sosialisasi keamanan pangan	5,00
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00
4	Pemberian paket edukasi keamanan pangan	10,00

5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya	
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5,00
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10,00
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15,00
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2 (Tahun 2020 dan 2021)	20,00
Total skor		100

Pada tahun 2021 triwulan III tahapan kegiatan yang dilakukan sudah mencapai persentase tahapan pada angka 80%.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Pada triwulan II rekomendasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yakni mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai perbaikan metode/penyesuaian materi untuk efektifitas kegiatan selanjutnya dan telah ditindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan yang mana menyesuaikan dengan jadwal pusat.

Keberhasilan pencapaian indikator “Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman” dikarenakan beberapa pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih cepat dr jadwal yang ditentukan pusat untuk mengantisipasi adanya pembatasan terkait pandemi covid-19.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain mengevaluasi capaian dan disesuaikan target jadwal dari pusat untuk kegiatan di TW IV serta arahan dari pimpinan yaitu tetap ditingkatkan kinerja agar target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

5.3 Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja ketiga adalah “Jumlah desa pangan aman” dengan target sebanyak 8 desa. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa

berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Jumlah desa pangan aman	75	74.99	99.99%	Baik

Tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20,00
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15,00
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00
7	Monitoring dan Evaluasi	15,00

8	Pengawasan tahun sebelumnya	10,00
	Total	100

Pada tahun 2021 triwulan III kegiatan yang selesai dilakukan mencapai progress sebesar 74.99%.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Pada TW II rekomendasi yang diberikan yakni mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai perbaikan metode/penyesuaian materi untuk efektifitas kegiatan selanjutnya dan telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal pusat.

Keberhasilan pencapaian indikator “Jumlah desa pangan aman”, hal ini dikarenakan balai telah melakukan pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pusat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain mengevaluasi capaian dan disesuaikan target jadwal dari pusat untuk kegiatan di TW IV serta arahan dari pimpinan yaitu tetap ditingkatkan kinerja agar target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Indikator Kinerja keempat adalah “Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya ” dengan target sebanyak 4 pasar . Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya

Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60	81.66	136.10%	Tidak dapat disimpulkan

Tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi	20,00
2	Survey Pasar	5,00
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	20,00

5	Penyuluhan	5,00
6	Kampanye	5,00
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20,00
8	Lomba Pasar Aman	10,00
	Total	100

Pada tahun 2021 triwulan III kegiatan yang selesai dilakukan mencapai 81.66%.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Pada TW II rekomendasi yang diberikan yakni mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai perbaikan metode/penyesuaian materi untuk efektifitas kegiatan selanjutnya dan telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal pusat.

Keberhasilan pencapaian indikator “Jumlah desa pangan aman”, hal ini dikarenakan beberapa pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan pusat untuk mengantisipasi adanya pembatasan terkait pandemi covid-19.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain mengevaluasi capaian dan disesuaikan target jadwal dari pusat untuk kegiatan di TW IV serta arahan dari pimpinan yaitu tetap ditingkatkan kinerja agar target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% ditambah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Jumlah sampel yang diuji sesuai standar 298 sampel. Sedangkan jumlah sampel yang diperiksa sesuai standar sebanyak 475. Jumlah target sampel Obat sebanyak 656 sampel. Realisasi capaian indikator sebesar 57.15% dengan persentase capaian sebesar 91.84% dimana masuk dalam kategori capaian “baik”.

Capaian Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	62.25	57.17	91.84%	Baik

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Pada TW II rekomendasi yang diberikan yakni adanya penambahan tenaga pramubakti kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uji untuk mencari alternatif meningkatkan kinerja terkait pemilihan metode Analisa dan telah ditindaklanjuti dengan cara memaksimalkan tenaga pramubakti dengan melakukan proses rolling dan mencari alternatif metode analisa yang dapat dilakukan.

Keberhasilan pencapaian indikator “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar”, yang belum maksimal hal ini dikarenakan:

- a) Kurangnya SDM untuk menyelesaikan proses pengujian sesuai time line
- b) Adanya pengadaan reagen yang terlambat
- c) Adanya kerusakan pada alat TLC di lab OT

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja adalah mempercepat perbaikan TLC di lab OT dan melakukan tender pra DIPA untuk mengantisipasi keterlambatan pengadaan reagen kemudian arahan dari pimpinan yakni memaksimalkan SDM yang ada baik PNS, pramubakti dan peserta magang untuk mencapai timeline pengujian yang telah ditetapkan.

6.2 Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% ditambah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Jumlah sampel yang diuji sesuai standar sebanyak 169 sampel. Sedangkan jumlah sampel yang diperiksa sesuai standar sebanyak 174. Jumlah target sampel Makanan sebanyak 248 sampel. Realisasi capaian indikator sebesar 69.12% dengan persentase capaian sebesar 102.44% dengan kategori baik.

Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	67.5	69.15	102.44%	Baik

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Pada TW II rekomendasi yang diberikan yakni tetap harus melakukan pengujian seluruh parameter uji yang dipersyaratkan dan sesuai timeline dan telah ditindaklanjuti dengan cara melakukan pengujian sesuai parameter uji yang dapat dilakukan dan memenuhi waktu pelaksanaan pengujian sesuai timeline.

Keberhasilan pencapaian indikator “Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar”, yang belum maksimal hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pengadaan baku pembanding sehingga mengganggu pengujian di lab pangan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja adalah melakukan terdapat pra DIPA untuk mengantisipasi keterlambatan pengadaan baku pembandingan. Kemudian arahan dari pimpinan yakni pengadaan baku agar menjadi prioritas.

7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan

Makanan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. P18/P19
3. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
4. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
5. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
6. Putusan pengadilan

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Realisasi Indikator Kinerja *output* Sasaran Kegiatan tahun 2021 triwulan III disajikan dalam Tabel berikut ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	78.75	393.75%	Tidak dapat disimpulkan

Indikator ini dapat dilihat dan dinilai dari kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan. Target perkara tahun 2021 sebanyak 4 perkara dimana 3 perkara target Balai dan 1 perkara target Loka POM. Realisasi pada triwulan III sebesar 78.75% serta capaian kinerja sebesar 393.75% dan termasuk dalam kategori capaian yang tidak dapat disimpulkan”.

Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi triwulan II

Rekomendasi perbaikan di TW II yakni berkoordinasi dengan Criminal Justice System agar perkara yang ditangani memperoleh P-21 dan dilakukan Tahap II dan telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti koordinator pengawas PPNS dan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat diperoleh P-21 dan dilakukannya tahap II pada triwulan III.

Keberhasilan pencapaian indikator “persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” yang masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan dikarenakan adanya penurunan target output pada perkara yang semula dari 6 perkara menjadi 4 perkara. Dalam pelaksanaan kegiatan juga Balai sudah menyelesaikan perkara sebanyak 3 perkara sampai dengan tahap II, sedangkan perkara Loka POM sampai pada tahap SPDP. Oleh karena adanya pencapaian yang sangat baik maka mempengaruhi persentase capaian indikator yang menjadikan capaian menjadi sangat tinggi. Namun dalam kaitannya pencapaiannya yang tinggi tersebut dikarenakan adanya perubahan target kinerja

yang sedang berproses di Renstra BPOM sehingga belum bisa dilakukan perubahan target pada indikator kinerja di Balai POM di Manokwari

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja serta arahan dari pimpinan yakni pelaksanaan kegiatan dalam penanganan perkara Loka POM kan diselesaikan sampai dengan TW IV agar tidak menjadi carry over di tahun sebelumnya dan dapat mencapai target kinerja dengan baik.

8.1 Indeks RB

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%.

Tabel capaian target kinerja pada indikator Indeks RB

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Indeks RB Balai POM di Manokwari	-	-	-	-

Penilaian indeks RB adalah tahunan, sehingga belum ada capaian pada triwulan III tahun 2021.

8.2 Nilai AKIP BPOM di Manokwari

Nilai Balai POM di Manokwari dinilai berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a) Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b) Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:

- a) Pemenuhan pengukuran (5%)
- b) Kualitas pengukuran (12,5%)
- c) Implementasi pengukuran (7,5%)
- 3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b) Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
- 4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b) Kualitas evaluasi (5%)
 - c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- 5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a) Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Manokwari	-	-	-	-

Penilaian AKIP Balai POM di Manokwari adalah tahunan, sehingga belum ada capaian pada triwulan III tahun 2021.

9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari

Capaian indikator kinerja dalam sasaran kinerja terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Realisasi Indikator Kinerja *output* Sasaran Kegiatan tahun 2021 triwulan III disajikan dalam tabel berikut ini:

Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari	-	-	-	-

Penilaian indeks profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari dilakukan pada akhir tahun 2021, sehingga belum terdapat capaian pada triwulan III tahun 2021.

10.1 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Penilaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dilakukan pada akhir tahun 2021, sehingga belum terdapat capaian pada triwulan III tahun 2021.

10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi balai POM di Manokwari

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai

- Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

**Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM
Manokwari**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM Manokwari	2.00	1.275	63.75%	Kurang

Rekomendasi perbaikan pada triwulan II yaitu:

1. Perlu dibuatkan nota dinas terbaru dari Kepala Balai kepada semua pegawai terkait kewajiban untuk mengaktifkan dan menggunakan email corporate. Perlu dilakukan sosialisasi menu pada email corporate, sehingga pegawai bisa lebih memanfaatkan email corporate masing - masing.
2. Membuat surat resmi kepada PUSDATIN terkait akun BOC.
3. Pembuatan SK Tim Medsos dan pembuatan rencana kerja serta monev berita aktual, yang melibatkan semua fungsi dan juga 6 area perubahan.
4. Melakukan perencanaan kegiatan koordinasi ke RS dalam rangka meminta personel yg ditunjuk sebagai pengisi data SIKER serta memperluas sumber laporan keracunan ke puskesmas.
5. Pembuatan SK Penanggung Jawab SIPT pada masing - masing fungsi, serta membuat timeline pengisian dan laporan monev pengisian SIPT pada masing-masing fungsi, sehingga jika terjadi kendala dalam proses input bisa segera ditindaklanjuti.

Rekomendasi yang telah diberikan telah ditindaklanjuti dengan pembuatan nota dinas, permohonan akun BOC, koordinasi SIKER, SK tim SOSMED dan SK penanggungjawab SIPT.

Keberhasilan pencapaian indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM Manokwari”, masuk dalam kategori kurang, hal ini dikarenakan pada triwulan III terdapat peningkatan dalam pemanfaatan email, akses BOC dan juga sistem informasi pada berita aktual namun belum maksimal dalam pemanfaatan sharing folder sehingga mempengaruhi capaian indeks pengelolaan data belum mencapai nilai maksimal.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja yakni pemanfaatan penggunaan sharing folder perlu ditingkatkan (pengguna pemeriksaan) peningkatan verifikasi akun SIKER(infokom), penggunaan email korporate untuk semua pegawai ditingkatkan, penginputan SIPT menjadi tanggungjawab pegawai yang masuk dalam SK, dan optimalisasi sosmed. Arahan pimpinan dalam peningkatan capaian indikator yaitu penanggungjawab yang masuk dalam semua SK agar mengerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus

13. Konfirmasi Capaian Output

Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari	50	70.16	140.32%	Tidak dapat disimpulkan

Nilai EKA Balai POM di Manokwari pada tahun 2021 triwulan III sebesar 55.32 sedangkan nilai IKPA Balai POM di Monokwari sebesar 92.42. Hasil pembobotan 60% nilai EKA dan 40% nilai IKPA diperoleh nilai kinerja anggaran Balai POM di Manokwari sebesar 70.16 dari target nilai 50 sehingga masuk dalam capaian kinerja yang tidak dapat disimpulkan.

Rekomendasi perbaikan pada triwulan II yaitu diharapkan pencapaian target output harus selesai pada tahun anggaran dengan cara optimalisasi kegiatan sehingga mampu terselesaikan semua target pada tahun berjalan dan telak dilakukan tindak lanjut dengan penyesuaian target karena adanya APBNP dan dilakukan realokasi terhadap anggaran yang kemungkinan tidak terserap.

Keberhasilan pencapaian indikator “Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari”,dikarenakan yakni antara lain:

1. Beberapa kegiatan dilakukan push pada triwulan III sehingga persentase capaian kinerja menjadi meningkat yang mempengaruhi capaian output dan nilai EKA.
2. Indikator IKPA yang masih rendah hanya pada konsistensi penyerapan anggaran karena beberapa kontrak yang dilakukan belum dapat dilakukan pembayaran karena belum selesai pekerjaan serta masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena keterbatasan akses yang belum maksimal karena pandemi.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain:

1. Kegiatan yang berupa tahapan agar dapat terlaksana pada tahun 2021 sampai dengan tahap terakhir.
2. Pengujian semua sampel harus selesai maksimal sebelum laporan tahunan dikerjakan.
3. Kegiatan pengelolaan keuangan harus dilakukan sesuai pedoman untuk menghindari penurunan nilai IKPA.

Arahan pimpinan dalam pencapaian target TW IV tahun 2021 yakni pencapaian indikator agar dipertahankan dengan memperhatikan semua komponen penilaian IKPA dan EKA.

11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

**Capaian Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di
Manokwari**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari	95.00%	95%	100%	Baik

Capaian output balai pada tahun 2021 triwulan III sebesar 84.34% sedangkan input yang digunakan sebesar 64.49% (berdasar perhitungan sas), dari persentase output dan input yang telah terealisasi diperoleh nilai efisiensi anggaran sebesar 95%.

Rekomendasi perbaikan di TW II yakni:

1. Perlu dilakukan refocusing anggaran di semua fungsi yang kira - kira tidak akan tercapai dikarenakan adanya pembatasan perjalanan yang disebabkan pandemi covid 19.
2. Melakukan rapat terkait pengelolaan keuangan untuk didapatkan permasalahan yang terjadi pada proses pencairan anggaran, sehingga bisa didapatkan solusi untuk permasalahan tersebut. Diharapkan terjadi percepatan proses pencairan anggaran sesuai timeline pada SOP Pertanggungjawaban Keuangan.

Tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan triwulan sebelumnya pada triwulan II

Rekomendasi yang diberikan pada triwulan II telah dilakukan tindak lanjut berupa refocusing, realokasi dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan di balai telah dilaksanakan dengan tepat.

Keberhasilan pencapaian indikator “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari”, capaian kinerja sampai dengan TW III masuk dalam kategori “baik” hal ini dikarenakan:

1. Kegiatan yang telah direncanakan namun tertunda di TW II telah dilaksanakan pada TW III

2. Penyesuaian target telah dilakukan untuk mengantisipasi tidak tercapainya target dan penyesuaian anggaran terkait refocusing
3. Realokasi anggaran yang dilakukan dapat mempercepat kegiatan sehingga mampu memaksimalkan penapaian output pada KRO

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain:

1. Kegiatan yang berupa tahapan agar dapat terlaksana pada tahun 2021 sampai dengan tahap terakhir
2. Pengujian semua sampel harus selesai maksimal sebelum laporan tahunan dikerjakan
3. Dilakukan penyesuaian anggaran pada TW IV

Arahan pimpinan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sampai dengan akhir tahun adalah realisasi anggaran dan fisik diharapkan dapat terlaksana secara optimal di akhir tahun dengan ketecapaian efisiensi yang maksimal.

C. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran Balai POM di Manokwari pada tahun 2021 triwulan III sebesar Rp. 24.079.803.000, sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2021 triwulan III adalah sebagai berikut.

1. Belanja pegawai Rp. 4.914.199.413
2. Belanja barang Rp. 7.112.575.789
3. Belanja modal Rp. 3.269.786.242

Total serapan anggaran tahun 2021 triwulan III sebesar Rp. 15.296.543.444 (sumber OM SPAN per September 2021).

BAB IV

PENUTUP

Pada Tahun 2021 triwulan III, secara garis besar pencapaian kinerja Balai POM di Manokwari dinilai dari 11 sasaran yang ditetapkan. Pencapaian Balai POM di Manokwari antara lain sebagai berikut :

1. 3 (tiga) sasaran strategis dengan kategori baik, yaitu
 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari
 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Manokwari
 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari
2. 1 (satu) sasaran strategis dengan kategori Kurang, yaitu:
 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
3. 3 (tiga) Sasaran strategis dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, yaitu :
 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari
 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari
 - Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel
4. 4 (empat) sasaran strategis merupakan target kinerja tahunan , yaitu:
 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari;
 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari;
 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal;
 - Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal.

Dalam menjaga sekaligus meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya, Balai POM di Manokwari berupaya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam hal, antara lain :

1. Tetap mengintensifkan pengawasan Obat dan Makanan di Papua Barat;
2. Mengintensifkan koordinasi dengan lintas sektor;
3. Melakukan patroli SIBER dan inteligen;
4. Mengintensifkan permintaan perbaikan melalui CAPA dengan dilakukan pendampingan pembuatan perbaikan melalui Sosialisasi CAPA;
5. Mengintensifkan pendampingan dan penilaian sarana sesuai dengan SOP;
6. Melakukan pencarian bahan materi KIE terupdate sesuai dengan informasi yang di butuhkan masyarakat saat ini;
7. Mengevaluasi capaian dan disesuaikan target jadwal dari pusat untuk kegiatan PN di triwulan IV;
8. Mempercepat perbaikan alat TLC di laboratorium Obat Tradisional;
9. Melakukan tender pra DIPA untuk mengantisipasi keterlambatan pengadaan reagen dan baku pembanding;
10. Pemanfaatan penggunaan sharing folder perlu ditingkatkan (pengguna pemeriksaan) peningkatan verifikasi akun SIKER(infokom), penggunaan email korporate untuk semua pegawai ditingkatkan, penginputan SIPT menjadi tanggungjawab pegawai yang masuk dalam SK, dan optimalisasi sosmed.
11. Pengoptimalan nilai pada indikator EKA dan IKPA .

Selanjutnya diharapkan seluruh pegawai di Balai POM di Manokwari akan tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja Balai POM di Manokwari dapat terus meningkat untuk periode pelaporan kinerja periode berikutnya.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herianto Baan, S.Si., Apt
Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 21 Desember 2020

Pihak Kedua



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Herianto Baan, S.Si., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84.5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37.5
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari	3.46
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85.10
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	8
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Indeks RB Balai POM di Manokwari	89
		Nilai AKIP Balai POM di Manokwari	84
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Manokwari yang optimal	2.00

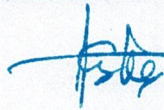
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari	Efisien (95%)

Anggaran

Kegiatan

- | | | |
|---|--|--------------------|
| 1 | Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | Rp. 17.921.364.000 |
| 2 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Rp. 10.147.700.000 |

Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Manokwari, 21 Desember 2020

Kepala Balai POM di Manokwari



Henanto Baan, S.Si., Apt

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI POM DI MANOKWARI

Sasaran Strategis		Indikator	Target				Anggaran
			B3	B6	B9	B12	
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6	83.6	83.6	Rp. 152.786.667
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	Rp. 114.607.333
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	Rp. 152.786.667
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	Rp. 114.607.333
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	76	Rp. 202.500.000

SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84.5	Rp. 381.750.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	73	Rp. 381.750.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari	-	-	-	90	Rp. 381.750.000
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	Rp. 565.079.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37.5	37.5	37.5	37.5	Rp. 565.079.000

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	Rp. 255.150.000
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	Rp. 171.044.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	Rp. 1.130.158.000
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari	-	-	-	3.46	Rp. 1.469.140.667
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85.10	85.10	85.10	85.10	Rp. 202.500.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	15%	20%	55%	40	Rp. 793.135.000
		Jumlah desa pangan aman	20%	35%	75%	8	Rp. 1.391.440.000

		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20%	25%	60%	4	Rp. 220.422.000
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20.75	41.50	62.25	85	Rp. 1.240.177.334
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22.50	45.00	67.50	91	Rp. 1.201.997.999
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	14	15	20	65	Rp. 1.123.261.000
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Indeks RB Balai POM di Manokwari	-	-	-	89	Rp. 275.524.400
		Nilai AKIP Balai POM di Manokwari	-	-	-	84	Rp. 275.524.400
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari	-	-	-	77	Rp. 6.885.528.000

SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	78	Rp. 7.594.792.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Manokwari yang optimal	2.00	2.00	2.00	2.00	Rp. 275.524.400
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari	15	30	50	94	Rp. 275.524.400
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Rp. 275.524.400

Manokwari, 21 Desember 2020
Kepala Balai POM di Manokwari



Horianto Bagas, S.Si., Apt

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	86,91	103,96%	Baik
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	76,4	95,50%	Baik
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	81,03	98,82%	Baik
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	74,42	86,53%	Cukup
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	0	0	-	Tahunan
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	-	Tahunan
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0	0	-	Tahunan
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0	0	-	Tahunan
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	76,09	85,49%	Cukup
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37,5	38,22	101,92%	Baik
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	96,43	109,58%	Baik

12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	49,12	89,31%	Cukup
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	79,15	125,63%	Tidak dapat disimpulkan
14	Indeks Pelayanan Publik	0	0	-	Tahunan
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,1	97,94	115,09%	Sangat Baik
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55	80	145,45%	Tidak dapat disimpulkan
17	Jumlah desa pangan aman	75	74,99	99,99%	Baik
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60	81,66	136,10%	Tidak dapat disimpulkan
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	62,25	57,17	91,84%	Baik
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	67,5	69,15	102,44%	Baik
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	78,75	393,75%	Tidak dapat disimpulkan
22	Indeks RB UPT	0	0	-	Tahunan
23	Nilai AKIP UPT	0	0	-	Tahunan
24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	-	Tahunan
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	-	Tahunan
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	1,275	63,75%	Kurang
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	50	70,16	140,32%	Tidak dapat disimpulkan
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	95	100,00%	Baik